BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PADANG TIJI TAHUN 2024-2044

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Padang Tiji Tahun 2024-2044;

Mengingat :

1. Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Otonomi Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530).

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 05 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 82 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PADANG TIJI TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pidie.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya..
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pidie.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang kawasan perkotaan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Wilayah perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah merupakan bagian dari kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya. Wilayah perencanaan RDTR tersebut ditetapkan oleh kepala daerah. Penetapan WP dapat mencakup wilayah administratif maupun fungsional.
18. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
19. Sub Wilayah perencanaan yang selanjutnya disebut SWP I adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan atau disingkat SPPK adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
24. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
25. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.

26. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
28. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
29. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31. Zona Badan Air (BA) adalah zona yang berupa air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
32. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
33. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
34. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
35. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
36. Sub-Zona Taman RW (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainya di lingkungan RW tersebut.
37. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) adalah area atau kawasan tertentu berupa area-terbuka yang digunakan untuk fungsi pemakaman.
38. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam sebagai aksesori jalan. Dapat berupa pulau jalan, yaitu RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan, median berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih, atau RTH yang memanjang pada tepian jalan.
39. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara sisi-sisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

40. Zona Perikanan (IK) adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
41. Sub-zona Perikanan Budi Daya (IK-2) adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana dan sarana umum yang ada.
42. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
43. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
44. Sub-zona Hortikultura (P-2) adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
45. Sub-zona Perkebunan (P-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
46. Sub-zona Peternakan (P-4) adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
47. Zona Pertambangan (T) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
48. Sub-zona Pertambangan Batuan (MBT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
49. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
51. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
52. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
53. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
54. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
55. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
56. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

57. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
58. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
59. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa.
60. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
61. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
62. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
63. Zona Peruntukan Lainnya (PL) adalah peruntukan yang digunakan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu.
64. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan/atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
65. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4) adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
66. Sub-Zona Pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
67. Zona Pengelolaan Persampahan (PP) adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
68. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
69. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
70. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang mengatur kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam suatu Sub-zona.
71. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zona nya dalam rencana detail tata ruang.
72. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

73. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah nilai Intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Sub-zona berdasarkan performa kawasan dengan mempertimbangkan Prasarana dan sarana/infrastruktur yang telah terbangun serta radius pelayanannya.
74. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
75. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/Kavling.
76. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
77. Kavling Minimum adalah luasan kavling minimum untuk pengembangan perumahan baru yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
78. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum bangunan yang diizinkan dari bidang terluar suatu bangunan ke bangunan yang ada samping.
79. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB jarak adalah minimum bangunan yang diizinkan dari bidang terluar suatu bangunan ke bangunan lainnya yang berada dibelakang.
80. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
81. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap as jalan, dihitung dari as jalan sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
82. Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal adalah ketentuan pada setiap zona yang memuat kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
83. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan kawasan.
84. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah ketentuan yang mengatur bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, terdiri dari lahan utama dan lahan cadangan yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
85. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

86. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara.
87. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
88. Ketentuan Khusus Migrasi Satwa adalah ketentuan pada area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan termasuk alur migrasi biota laut.
89. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Sub-zona yang perlu didorong pengembangannya.
90. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, memberikan batasan pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan/kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
91. Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.
92. Kavling adalah bidang Lahan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan batas kepemilikan Lahan secara hukum/legal.
93. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
94. Zona Pengendalian Pertumbuhan adalah TPZ yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan.
95. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
96. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
97. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. ruang lingkup WP;
b. tujuan penataan WP;
c. rencana struktur ruang;
d. rencana pola ruang;
e. ketentuan pemanfaatan ruang;
f. peraturan zonasi;
g. kelembagaan dan peran masyarakat;
h. ketentuan lain-lain;
i. ketentuan peralihan; dan
j. ketentuan penutup.

BAB III
PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a meliputi:
   a. lingkup WP;
   b. batas wilayah perencanaan; dan
   c. pembagian SWP dan Blok.
(2) Lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh wilayah berdasarkan aspek administratif dan fungsional dengan luas 9.163,13 (sembilan ribu seratus enam puluh tiga koma satu tiga) hektare, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundang-undangan.
(3) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1)huruf b meliputi:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Tiga, Kecamatan Bate;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Delima, Kecamatan Grong Grong;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Titeue, Kecamatan Keumala, dan Kecamatan Mila; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.
(4) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi menjadi 4 (empat) SWP dan 97 (sembilan puluh tujuh) Blok, meliputi:
   a. SWP I.A seluas 2.911,89 (dua ribu sembilan ratus sebelas koma delapan sembilan) hektare, terdiri atas 26 (dua puluh enam) Blok, meliputi:
      1. Blok I.A.1 dengan luas 185,28 (seratus delapan puluh lima koma dua delapan) hektare, berada di Gampong Tunong Tanjong;
      2. Blok I.A.2 dengan luas 70,89 (tujuh puluh koma delapan sembilan) hektare, berada di Gampong Tunong Tanjong;
      3. Blok I.A.3 dengan luas 138,67 (seratus tiga puluh delapan koma enam tujuh) hektare, berada di Gampong Tunong Tanjong;
      4. Blok I.A.4 dengan luas 119,22 (seratus sembilan belas koma dua dua) hektare, berada di Gampong Jok Tanjong, Gampong Tunong Tanjong;
      5. Blok I.A.5 dengan luas 272,17 (dua ratus tujuh puluh dua koma satu tujuh) hektare, berada di Gampong Jok Tanjong, Gampong Tunong Tanjong;
      6. Blok I.A.6 dengan luas 145,89 (seratus empat puluh lima koma delapan sembilan) hektare, berada di Gampong Jok Tanjong, Gampong Keupula Tanjong;

7. Blok I.A.7 dengan luas 176,57 (seratus tujuh puluh enam koma lima tujuh) hektare, berada di Gampong Jok Tanjong, Gampong Keupula Tanjong;
8. Blok I.A.8 dengan luas 193,69 (seratus sembilan puluh tiga koma enam sembilan) hektare, berada di Gampong Jok Tanjong, Gampong Keupula Tanjong;
9. Blok I.A.9 dengan luas 106,19 (seratus enam koma satu sembilan) hektare, berada di Gampong Jok Tanjong, Gampong Keupula Tanjong;
10. Blok I.A.10 dengan luas 374,91 (tiga ratus tujuh puluh empat koma sembilan satu) hektare, berada di Gampong Baro Beurabo, Gampong Keupula Tanjong, Gampong Khang Tanjong, Gampong Meuriya Tanjong, Gampong Seuleunggieng Beurabo;
11. Blok I.A.11 dengan luas 78,36 (tujuh puluh delapan koma tiga enam) hektare, berada di Gampong Baro Beurabo, Gampong Meuriya Tanjong, Gampong Seukeumbrok Beurabo, Gampong Seuleunggieng Beurabo;
12. Blok I.A.12 dengan luas 82,72 (delapan puluh dua koma tujuh dua) hektare, berada di Gampong Keupula Tanjong, Gampong Khang Tanjong, Gampong Leun Tanjong;
13. Blok I.A.13 dengan luas 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) hektare, berada di Gampong Baro Beurabo, Gampong Grong-Grong Gogo, Gampong Khang Tanjong, Gampong Leun Tanjong, Gampong Meuriya Tanjong, Gampong Seukeumbrok Beurabo;
14. Blok I.A.14 dengan luas 48,61 (empat puluh delapan koma enam satu) hektare, berada di Gampong Baro Beurabo, Gampong Mesjid Beurabo, Gampong Meuke Beurabo, Gampong Seukeumbrok Beurabo;
15. Blok I.A.15 dengan luas 31,82 (tiga puluh satu koma delapan dua) hektare, berada di Gampong Baro Beurabo, Gampong Meuke Beurabo, Gampong Seukeumbrok Beurabo;
16. Blok I.A.16 dengan luas 33,50 (tiga puluh tiga koma lima) hektare, berada di Gampong Adang Beurabo, Gampong Mesjid Beurabo, Gampong Meuke Beurabo;
17. Blok I.A.17 dengan luas 133,13 (seratus tiga puluh tiga koma satu tiga) hektare, berada di Gampong Adang Beurabo, Gampong Baro Beurabo, Gampong Meuke Beurabo, Gampong Seuleunggieng Beurabo;
18. Blok I.A.18 dengan luas 79,25 (tujuh puluh sembilan koma dua lima) hektare, berada di Gampong Grong-Grong Gogo, Gampong Leun Tanjong, Gampong Pante Crueng Tanjong;
19. Blok I.A.19 dengan luas 29,06 (dua puluh sembilan koma nol enam) hektare, berada di Gampong Leun Tanjong, Gampong Pante Crueng Tanjong;
20. Blok I.A.20 dengan luas 57,34 (lima puluh tujuh koma tiga empat) hektare, berada di Gampong Aron Bunot Gogo, Gampong Grong-Grong Gogo, Gampong Leuhob Paloh, Gampong Pante Crueng Tanjong, Gampong Pasar Paloh;

21. Blok I.A.21 dengan luas 56,01 (lima puluh enam koma nol satu) hektare, berada di Gampong Aron Bunot Gogo, Gampong Grong-Grong Gogo, Gampong Pante Crueng Tanjong, Gampong Pasar Paloh, Gampong Teungoh Drien Gogo;
22. Blok I.A.22 dengan luas 90,47 (sembilan puluh koma empat tujuh) hektare, berada di Gampong Aron Bunot Gogo, Gampong Grong-Grong Gogo, Gampong Mesjid Gogo, Gampong Seukeumbrok Beurabo;
23. Blok I.A.23 dengan luas 116,20 (seratus enam belas koma dua) hektare, berada di Gampong Adang Beurabo, Gampong Glee Gogo, Gampong Mesjid Beurabo, Gampong Mesjid Gogo, Gampong Seukeumbrok Beurabo;
24. Blok I.A.24 dengan luas 65,54 (enam puluh lima koma lima empat) hektare, berada di Gampong Adang Beurabo, Gampong Glee Gogo, Gampong Kumbang Gogo, Gampong Mesjid Beurabo, Gampong Tuha Gogo;
25. Blok I.A.25 dengan luas 34,42 (tiga puluh empat koma empat dua) hektare, berada di Gampong Adang Beurabo, Gampong Glee Gogo, Gampong Paloh Jeurat Beurabo; dan
26. Blok I.A.26 dengan luas 110,92 (seratus sepuluh koma sembilan dua) hektare, berada di Gampong Adang Beurabo, Gampong Glee Gogo, Gampong Paloh Jeurat Beurabo.

b. SWP I.B seluas 2.247,84 (dua ribu dua ratus empat puluh tujuh koma delapan empat) hektare terdiri atas 26 (dua puluh enam) Blok, meliputi:
   1. Blok I.B.1 dengan luas 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat tiga) hektare, berada di Gampong Tunong Tanjong;
   2. Blok I.B.2 dengan luas 95,97 (sembilan puluh lima koma sembilan tujuh) hektare, berada di Gampong Tunong Tanjong;
   3. Blok I.B.3 dengan luas 92,16 (sembilan puluh dua koma satu enam) hektare, berada di Gampong Jok Tanjong, Gampong Tunong Tanjong;
   4. Blok I.B.4 dengan luas 79,86 (tujuh puluh sembilan koma delapan enam) hektare, berada di Gampong Jok Tanjong, Gampong Tunong Tanjong;
   5. Blok I.B.5 dengan luas 216,74 (dua ratus enam belas koma tujuh empat) hektare, berada di Gampong Jok Tanjong, Gampong Keupula Tanjong, Gampong Leun Tanjong, Gampong Mesjid Tanjong;
   6. Blok I.B.6 dengan luas 65,86 (enam puluh lima koma delapan enam) hektare, berada di Gampong Jok Tanjong;
   7. Blok I.B.7 dengan luas 141,26 (seratus empat puluh satu koma dua enam) hektare, berada di Gampong Jok Tanjong, Gampong Leun Tanjong, Gampong Mesjid Tanjong;
   8. Blok I.B.8 dengan luas 62,31 (enam puluh dua koma tiga satu) hektare, berada di Gampong Keupula Tanjong, Gampong Leun Tanjong, Gampong Mesjid Tanjong;
   9. Blok I.B.9 dengan luas 60,46 (enam puluh koma empat enam) hektare, berada di Gampong Keupula Tanjong, Gampong Leun Tanjong;

10. Blok I.B.10 dengan luas 69,92 (enam puluh sembilan koma sembilan dua) hektare, berada di Gampong Leun Tanjong, Gampong Mesjid Tanjong;
11. Blok I.B.11 dengan luas 83,74 (delapan puluh tiga koma tujuh empat) hektare, berada di Gampong Keupula Tanjong, Gampong Leun Tanjong;
12. Blok I.B.12 dengan luas 76,80 (tujuh puluh enam koma delapan nol) hektare, berada di Gampong Mesjid Tanjong;
13. Blok I.B.13 dengan luas 127,82 (seratus dua puluh tujuh koma delapan dua) hektare, berada di Gampong Mesjid Tanjong, Gampong Pulo Hagu Tanjong;
14. Blok I.B.14 dengan luas 51,69 (lima puluh satu koma enam sembilan) hektare, berada di Gampong Mesjid Tanjong;
15. Blok I.B.15 dengan luas 88,70 (delapan puluh delapan koma tujuh nol) hektare, berada di Gampong Leun Tanjong, Gampong Mesjid Tanjong;
16. Blok I.B.16 dengan luas 52,18 (lima puluh dua koma satu delapan) hektare, berada di Gampong Mesjid Tanjong, Gampong Siron Tanjong;
17. Blok I.B.17 dengan luas 40,49 (empat puluh koma empat sembilan) hektare, berada di Gampong Mesjid Tanjong, Gampong Pulo Hagu Tanjong;
18. Blok I.B.18 dengan luas 30,03 (tiga puluh koma nol tiga) hektare, berada di Gampong Mesjid Tanjong, Gampong Pulo Hagu Tanjong;
19. Blok I.B.19 dengan luas 48,91 (empat puluh delapan koma sembilan satu) hektare, berada di Gampong Cot Keutapang Tanjong, Gampong Leun Tanjong, Gampong Pante Crueng Tanjong;
20. Blok I.B.20 dengan luas 127,44 (seratus dua puluh tujuh koma empat empat) hektare, berada di Gampong Mesjid Tanjong, Gampong Pulo Hagu Tanjong, Gampong Siron Tanjong;
21. Blok I.B.21 dengan luas 136,78 (seratus tiga puluh enam koma tujuh delapan) hektare, berada di Gampong Cot Keutapang Tanjong, Gampong Mesjid Tanjong, Gampong Pulo Hagu Tanjong, Gampong Trieng Paloh;
22. Blok I.B.22 dengan luas 78,59 (tujuh puluh delapan koma lima sembilan) hektare, berada di Gampong Cot Keutapang Tanjong, Gampong Leuhob Paloh, Gampong Pulo Hagu Tanjong, Gampong Trieng Paloh;
23. Blok I.B.23 dengan luas 101,02 (seratus satu koma nol dua) hektare, berada di Gampong Cot Keutapang Tanjong, Gampong Leuhob Paloh, Gampong Leun Tanjong, Gampong Pante Crueng Tanjong, Gampong Pasar Paloh, Gampong Trieng Paloh;
24. Blok I.B.24 dengan luas 46,26 (empat puluh enam koma dua enam) hektare, berada di Gampong Leuhob Paloh, Gampong Pante Crueng Tanjong, Gampong Pasar Paloh;
25. Blok I.B.25 dengan luas 104,66 (seratus empat koma enam enam) hektare, berada di Gampong Cot Keutapang Tanjong, Gampong Pulo Hagu Tanjong, Gampong Siron Tanjong; dan

26. Blok I.B.26 dengan luas 70,75 (tujuh puluh koma tujuh lima) hektare, berada di Gampong Cot Keutapang Tanjong, Gampong Pulo Hagu Tanjong, Gampong Suyo Paloh, Gampong Trieng Paloh.

c. SWP I.C seluas 2.172,10 (dua ribu seratus tujuh puluh dua koma satu) hektare terdiri atas 34 (tiga puluh empat) Blok, meliputi:
   1. Blok I.C.1 dengan luas 83,22 (delapan puluh tiga koma dua dua) hektare, berada di Gampong Balee Paloh, Gampong Cot Keutapang Tanjong, Gampong Pasar Paloh, Gampong Siron Paloh, Gampong Suyo Paloh, Gampong Trieng Paloh;
   2. Blok I.C.2 dengan luas 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) hektare, berada di Gampong Cot Keutapang Tanjong, Gampong Pasar Paloh, Gampong Trieng Paloh;
   3. Blok I.C.3 dengan luas 28,51 (dua puluh delapan koma lima satu) hektare, berada di Gampong Gampong Cut Paloh, Gampong Pante Cermen Paloh, Gampong Pasar Paloh, Gampong Teungoh Drien Gogo;
   4. Blok I.C.4 dengan luas 12,61 (dua belas koma enam satu) hektare, berada di Gampong Pasar Paloh, Gampong Teungoh Drien Gogo;
   5. Blok I.C.5 dengan luas 28,21 (dua puluh delapan koma dua satu) hektare, berada di Gampong Aron Bunot Gogo, Gampong Pasar Paloh, Gampong Teungoh Drien Gogo;
   6. Blok I.C.6 dengan luas 16,82 (enam belas koma delapan dua) hektare, berada di Gampong Aron Bunot Gogo, Gampong Buloh Gogo, Gampong Mesjid Gogo;
   7. Blok I.C.7 dengan luas 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) hektare, berada di Gampong Kumbang Gogo, Gampong Mesjid Beurabo, Gampong Mesjid Gogo;
   8. Blok I.C.8 dengan luas 16,34 (enam belas koma tiga empat) hektare, berada di Gampong Glee Gogo, Gampong Kumbang Gogo, Gampong Mesjid Beurabo, Gampong Tuha Gogo;
   9. Blok I.C.9 dengan luas 89,02 (delapan puluh sembilan koma nol dua) hektare, berada di Gampong Glee Gogo, Gampong Tuha Gogo, Gampong Tunong Peudaya;
   10. Blok I.C.10 dengan luas 49,23 (empat puluh sembilan koma dua tiga) hektare, berada di Gampong Balee Paloh, Gampong Capa Paloh, Gampong Kreet Paloh, Gampong Suyo Paloh;
   11. Blok I.C.11 dengan luas 30,00 (tiga puluh) hektare, berada di Gampong Balee Paloh, Gampong Gampong Cut Paloh, Gampong Pasar Paloh, Gampong Siron Paloh, Gampong Teungoh Peudaya;
   12. Blok I.C.12 dengan luas 25,28 (dua puluh lima koma dua delapan) hektare, berada di Gampong Gampong Cut Paloh, Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Gampong Pasar Paloh, Gampong Teungoh Peudaya;
   13. Blok I.C.13 dengan luas 19,53 (sembilan belas koma lima tiga) hektare, berada di Gampong Meuke Gogo, Gampong Pante Cermen Paloh, Gampong Teungoh Drien Gogo;

14. Blok I.C.14 dengan luas 15,27 (lima belas koma dua tujuh) hektare, berada di Gampong Aron Bunot Gogo, Gampong Buloh Gogo, Gampong Meuke Gogo, Gampong Raya Gogo, Gampong Teungoh Drien Gogo;
15. Blok I.C.15 dengan luas 80,90 (delapan puluh koma sembilan nol) hektare, berada di Gampong Aron Bunot Gogo, Gampong Buloh Gogo, Gampong Kumbang Gogo, Gampong Mesjid Gogo, Gampong Tuha Gogo, Gampong Tunong Peudaya;
16. Blok I.C.16 dengan luas 53,11 (lima puluh tiga koma satu satu) hektare, berada di Gampong Balee Paloh, Gampong Capa Paloh, Gampong Cot Kunyet, Gampong Jurong Anoe Paloh, Gampong Teungoh Peudaya;
17. Blok I.C.17 dengan luas 43,84 (empat puluh tiga koma delapan empat) hektare, berada di Gampong Dayah Peudaya, Gampong Gampong Cut Paloh, Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Gampong Teungoh Peudaya;
18. Blok I.C.18 dengan luas 47,98 (empat puluh tujuh koma sembilan delapan) hektare, berada di Gampong Gampong Cut Paloh, Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Gampong Mesjid Peudaya, Gampong Meuke Gogo, Gampong Pante Cermen Paloh, Gampong Raya Gogo, Gampong Sukon Peudaya, Gampong Tuha Peudaya;
19. Blok I.C.19 dengan luas 37,55 (tiga puluh tujuh koma lima lima) hektare, berada di Gampong Cut Peudaya, Gampong Raya Gogo, Gampong Sukon Peudaya, Gampong Tunong Peudaya;
20. Blok I.C.20 dengan luas 95,80 (sembilan puluh lima koma delapan nol) hektare, berada di Gampong Aron Bunot Gogo, Gampong Buloh Gogo, Gampong Kumbang Gogo, Gampong Raya Gogo, Gampong Teungoh Drien Gogo, Gampong Tunong Peudaya;
21. Blok I.C.21 dengan luas 61,04 (enam puluh satu koma nol empat) hektare, berada di Gampong Cut Peudaya, Gampong Tuha Gogo, Gampong Tunong Peudaya;
22. Blok I.C.22 dengan luas 70,56 (tujuh puluh koma lima enam) hektare, berada di Gampong Blang Geuleudieng, Gampong Capa Paloh, Gampong Cot Kunyet, Gampong Geulumpang Geuleudieng, Gampong Jurong Anoe Paloh, Gampong Mesjid Geuleudieng, Gampong Teungoh Peudaya;
23. Blok I.C.23 dengan luas 177,21 (seratus tujuh puluh tujuh koma dua satu) hektare, berada di Gampong Blang Geuleudieng, Gampong Cot Kunyet, Gampong Dayah Peudaya, Gampong Geulumpang Geuleudieng, Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Gampong Mesjid Geuleudieng, Gampong Mesjid Peudaya, Gampong Perlak Peudaya, Gampong Teungoh Peudaya, Gampong Tuha Peudaya;
24. Blok I.C.24 dengan luas 18,31 (delapan belas koma tiga satu) hektare, berada di Gampong Buloh Peudaya, Gampong Cut Peudaya, Gampong Mesjid Peudaya, Gampong Sukon Peudaya;

25. Blok I.C.25 dengan luas 85,56 (delapan puluh lima koma lima enam) hektare, berada di Gampong Cut Peudaya, Gampong Mesjid Peudaya, Gampong Tunong Peudaya;
26. Blok I.C.26 dengan luas 26,67 (dua puluh enam koma enam tujuh) hektare, berada di Gampong Blang Geuleudieng, Gampong Geulumpang Geuleudieng, Gampong Mesjid Geuleudieng;
27. Blok I.C.27 dengan luas 91,10 (sembilan puluh satu koma satu nol) hektare, berada di Gampong Blang Geuleudieng, Gampong Buloh Peudaya, Gampong Buni Reulieng Peudaya, Gampong Dayah Baroh Kunyet, Gampong Mesjid Geuleudieng, Gampong Mesjid Peudaya, Gampong Perlak Peudaya, Gampong Piala Kunyet, Gampong Tuha Peudaya;
28. Blok I.C.28 dengan luas 62,65 (enam puluh dua koma enam lima) hektare, berada di Gampong Buloh Peudaya, Gampong Buni Reulieng Peudaya, Gampong Cut Peudaya, Gampong Mesjid Peudaya;
29. Blok I.C.29 dengan luas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektare, berada di Gampong Blang Geuleudieng, Gampong Dayah Baroh Kunyet, Gampong Mesjid Geuleudieng, Gampong Mesjid Kunyet;
30. Blok I.C.30 dengan luas 162,97 (seratus enam puluh dua koma sembilan tujuh) hektare, berada di Gampong Baro Kunyet, Gampong Dayah Baroh Kunyet, Gampong Hagu Kunyet, Gampong Mesjid Geuleudieng, Gampong Mesjid Kunyet, Gampong Piala Kunyet;
31. Blok I.C.31 dengan luas 149,46 (seratus empat puluh sembilan koma empat enam) hektare, berada di Gampong Buni Reulieng Peudaya, Gampong Hagu Kunyet, Gampong Mesjid Geuleudieng, Gampong Mesjid Peudaya, Gampong Perlak Peudaya, Gampong Piala Kunyet;
32. Blok I.C.32 dengan luas 37,80 (tiga puluh tujuh koma delapan) hektare, berada di Gampong Baro Kunyet, Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Gampong Mesjid Kunyet, Gampong Piala Kunyet;
33. Blok I.C.33 dengan luas 172,48 (seratus tujuh puluh dua koma empat delapan) hektare, berada di Gampong Baro Kunyet, Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Gampong Hagu Kunyet, Gampong Kambuek Payapi Kunyet, Gampong Piala Kunyet; dan
34. Blok I.C.34 dengan luas 173,28 (seratus tujuh puluh tiga koma dua delapan) hektare, berada di Gampong Baro Kunyet, Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Gampong Kambuek Nicah Kunyet, Gampong Kambuek Payapi Kunyet.

d. SWP I.D seluas 1.831,30 (seribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) hektare terdiri atas 11 (sebelas) Blok, meliputi:

1. Blok I.D.1 dengan luas 107,54 (seratus tujuh koma lima empat) hektare, berada di Gampong Cot Keutapang Tanjong, Gampong Kreet Paloh, Gampong Siron Tanjong, Gampong Suyo Paloh;
2. Blok I.D.2 dengan luas 139,17 (seratus tiga puluh sembilan koma satu tujuh) hektare, berada di Gampong Balee Paloh, Gampong Capa Paloh, Gampong Jurong Anoe Paloh, Gampong Kreet Paloh, Gampong Suyo Paloh;
3. Blok I.D.3 dengan luas 244,34 (dua ratus empat puluh empat koma tiga empat) hektare, berada di Gampong Geulumpang Geuleudieng, Gampong Jurong Anoe Paloh;
4. Blok I.D.4 dengan luas 140,92 (seratus empat puluh koma sembilan dua) hektare, berada di Gampong Blang Geuleudieng, Gampong Capa Paloh, Gampong Cot Kunyet, Gampong Geulumpang Geuleudieng, Gampong Jurong Anoe Paloh;
5. Blok I.D.5 dengan luas 157,79 (seratus lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektare, berada di Gampong Blang Geuleudieng, Gampong Geulumpang Geuleudieng;
6. Blok I.D.6 dengan luas 195,62 (seratus sembilan puluh lima koma enam dua) hektare, berada di Gampong Blang Geuleudieng, Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Gampong Kambuek Nicah Kunyet, Gampong Mesjid Kunyet;
7. Blok I.D.7 dengan luas 113,65 (seratus tiga belas koma enam lima) hektare, berada di Gampong Blang Geuleudieng, Gampong Dayah Baroh Kunyet, Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Gampong Mesjid Kunyet;
8. Blok I.D.8 dengan luas 298,11 (dua ratus sembilan puluh delapan koma satu satu) hektare, berada di Gampong Blang Gunci Kunyet, Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Gampong Kambuek Nicah Kunyet, Gampong Seunadeu Kunyet;
9. Blok I.D.9 dengan luas 132,11 (seratus tiga puluh dua koma satu satu) hektare, berada di Gampong Kambuek Nicah Kunyet, Gampong Kambuek Payapi Kunyet, Gampong Seunadeu Kunyet;
10. Blok I.D.10 dengan luas 135,35 (seratus tiga puluh lima koma tiga lima) hektare, berada di Gampong Blang Gunci Kunyet, Gampong Seunadeu Kunyet; dan
11. Blok I.D.11 dengan luas 166,69 (seratus enam puluh enam koma enam sembilan) hektare, berada di Gampong Blang Gunci Kunyet, Gampong Seunadeu Kunyet.

(5) Delineasi wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (4) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Padang Tiji sebagai sentra agrobisnis didukung sektor pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri atas:
   a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
   b. rencana jaringan transportasi;
   c. rencana jaringan energi;
   d. rencana jaringan telekomunikasi;
   e. rencana jaringan sumber daya air;
   f. rencana jaringan air minum;
   g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
   h. rencana jaringan persampahan;
   i. rencana jaringan drainase; dan
   j. rencana jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan dicantumkan dalam bentuk Lampiran III pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
   b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
   c. pusat lingkungan kelurahan/ desa.
(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pusat Pelayanan Kota Paloh terletak di SWP I.C pada Blok I.C.3.
(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. SPPK Beuraboh terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.11;
   b. SPPK Tanjong terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.19;

c. SPPK Gogo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.9; dan
d. SPPK Kunyet terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.29.

(4) Pusat lingkungan kelurahan/ desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Pusat lingkungan kelurahan/ desa Tunong Tanjong terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
b. Pusat lingkungan kelurahan/ desa Seunadeu Kunyet terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8.

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. jalan arteri primer;
b. jalan kolektor primer;
c. jalan lokal primer;
d. jalan lingkungan primer;
e. jalan lingkungan sekunder;
f. jalan tol;
g. terminal penumpang tipe C;
h. jembatan;
i. halte;
j. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
k. stasiun kereta api.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu ruas Batas Pidie/Aceh Besar - Bts. Kota Sigli melalui:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.26;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.15, Blok I.B.19, Blok I.B.23, dan Blok I.B.24; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.

(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. ruas Gogo-Batee melewati SWP I.A pada Blok I.A.22 dan Blok I.A.23;
b. ruas Leueun Tanjong – Seukeum Broek – Beurabo melewati SWP I.A pada Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.18, Blok I.A.21 dan Blok I.A.22; dan
c. ruas jalan kolektor primer yang melewati SWP I.A pada Blok I.A.23.

(4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. ruas Gogo-Batee melewati SWP I.A pada Blok I.A.11, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;

b. ruas Padang Tiji-Kunyet melewati:
   1. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.29, Blok I.C.32, dan Blok I.C.34; dan
   2. SWP I.D pada Blok I.D.8, Blok I.D.9 dan Blok I.D.10.
c. ruas Padang Tiji – Reubee melewati:
   1. SWP I.B pada Blok I.B.24; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.27, Blok I.C.28 dan Blok I.C.31.
d. Jalan lokal primer yang melewati:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.22, Blok I.A.23; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.23, Blok I.C.26, Blok I.C.32.

(5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. ruas Alue Rheu – Blang Uteun Siron melewati SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
b. ruas Balee Paloh - Suyo Paloh melewati SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.10;
c. ruas Buloh - Mesjid Kunyet melewati SWP I.C pada Blok I.C.27, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31, dan Blok I.C.32;
d. ruas Cot Keutapang – Siron Tanjong – Seumayam melewati SWP I.B pada Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, dan Blok I.B.21;
e. ruas Cot Padang Lila-Kareung melewati SWP I.A pada Blok I.A.1;
f. ruas Cot Padang Lila – TPA melewati SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
g. ruas Gampong Cot – Kret Paloh melewati:
   1. SWP I.B pada Blok I.B.26;
   2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.10; dan
   3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
h. Jalan Nasional – Rajui melewati SWP I.B pada Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.14, dan Blok I.B.15;
i. ruas Jurong Anoe – Alue Rheu, melewati:
   1. SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.16, dan Blok I.C.22; dan
   2. SWP I.D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.
j. ruas Keumala – Padang Tiji melewati SWP I.B pada Blok I.B.5 dan Blok I.B.7;
k. ruas Kumbang – Glee Cirieh melewati SWP I.C pada Blok I.C.21 dan Blok I.C.25;
l. ruas Padang Tij – Kali Satu melewati:
   1. SWP I.B pada Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.25, dan Blok I.B.26; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
m. ruas Pasar Paloh – Mesjid Peudaya melewati SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.24, dan Blok I.C.25;

n. ruas Seulingging – Mns. Kupula melewati SWP I.A pada Blok I.A.9, I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, dan Blok I.A.15;
o. ruas Siron Paloh – Jurong Anoe melewati SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.16, dan Blok I.C.22;
p. ruas Sp. Tanjong – Desa Leuen melewati SWP I.B pada Blok I.B.15, Blok I.B.19, Blok I.B.21, Blok I.B.22, dan Blok I.B.23;
q. ruas Sp. Tanjong – Seumanyam melewati SWP I.B pada Blok I.B.13, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.20, dan Blok I.B.21;
r. ruas Tuha Gogo – Tunong Peudaya melewati SWP I.C pada Blok I.C.8, Blok I.C.9, I.C.15, Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.25;
s. ruas Tuha Peudaya – Mesjid Peudaya melewati SWP I.C pada Blok I.C.23, dan Blok I.C.27;
t. ruas jalan lingkungan primer melewati:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25, dan Blok I.A.26;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, dan Blok I.B.26;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31, Blok I.C.32, Blok I.C.33, dan Blok I.C.34; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9.

(6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. ruas Buloh Peudaya – Buni Reuling melewati SWP I.C pada Blok I.C.27;
b. ruas Pasar Paloh – Mesjid Peudaya melewati SWP I.C pada Blok I.C.14 dan Blok I.C.18;
c. ruas Paya Reubee – Mns Tunong melewati SWP I.C pada Blok I.C.31 dan Blok I.C.33;
d. ruas Suyo Paloh – Alue Baroh melewati SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
e. ruas jalan lingkungan sekunder lainnya, meliputi:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.26;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, dan Blok I.B.26;
3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31, Blok I.C.32, Blok I.C.33, dan Blok I.C.34; dan
4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, dan Blok I.D.11.

(7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
   a. ruas Lhokseumawe – Sigli melewati:
      1. SWP I.C pada Blok I.C.22, Blok I.C.26, Blok I.C.29, Blok I.C.32, dan Blok I.C.34; dan
      2. SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, dan Blok I.D.9
   b. ruas Sigli-Banda Aceh melewati:
      1. SWP I.B pada Blok I.B.25, Blok I.B.26; dan
      2. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.16, Blok I.C.18, dan Blok I.C.22; dan
      3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4.

(8) Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu Terminal Padang Tiji terdapat pada SWP I.C pada Blok I.C.6.

(9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.6, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.15, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.15, Blok I.B.19, dan Blok I.B.24;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.13, Blok I.C.31 dan Blok I.C.32; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.8.

(10) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.21;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.19, dan Blok I.B.24; dan
   c. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.

(11) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
   a. jalur kereta api antarkota Banda Aceh – Sigli melewati:
      1. SWP I.A pada Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.26; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, dan Blok I.B.25.

b. Jalur Kereta Api Trans Sumatera Lintas Aceh – Besitang melewati:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.13, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.7, Blok I.C.15, Blok I.C.20, Blok I.C.25, Blok I.C.28, Blok I.C.31, dan Blok I.C.33.

(12) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu stasiun penumpang kecil meliputi:
   a. Stasiun Gogo terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.23; dan
   b. Stasiun Tunong Tanjong terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

(13) Jaringan jalur kereta api antar kota jalur Banda Aceh-Sigli sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan;
   b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
   c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
   d. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
   e. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
   f. gardu listrik.

(2) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan yaitu jaringan pipa gas bumi KIA Ladong – KEK Arun melewati:
   a. SWP I.B pada Blok I.B.25 dan Blok I.B.26; dan
   b. SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.22, Blok I.C.26, Blok I.C.29, Blok I.C.32, dan Blok I.C.34.

(3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu SUTET Sigli-Ulee Kareng 275 kV, melewati:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22 dan Blok I.A.23;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.15 dan Blok I.B.19; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.7, Blok I.C.9 dan Blok I.C.15.

(4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu SUTT 150 kV Banda Aceh - Sigli, melewati:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25, dan Blok I.A.26; dan
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.15, dan Blok I.B.19.

(5) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melewati:
   a. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.15, Blok I.B.19, Blok I.B.23, dan Blok I.B.24;
   b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.29, Blok I.C.31, Blok I.C.32, dan Blok I.C.34; dan
   c. SWP I.D pada Blok I.D.8 dan Blok I.D.10.

(6) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melewati:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, dan Blok I.B.26;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31, Blok I.C.32, Blok I.C.33, dan Blok I.C.34; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8 dan Blok I.D.9.

(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu berupa gardu distribusi, terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.16;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.19, Blok I.B.24 dan Blok I.B.25; dan
   c. SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.24, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.29 dan Blok I.C.32.

(6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. jaringan tetap; dan
   b. jaringan bergerak seluler.
(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jaringan serat optik; dan
   b. jaringan telepon *fixed line*.
(3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25, dan Blok I.A.26;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.15, Blok I.B.19, Blok I.B.22, Blok I.B.23, dan Blok I.B.24;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.16, Blok I.C.22, Blok I.C.26, Blok I.C.29, Blok I.C.32, dan Blok I.C.34; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.8 dan Blok I.D.10.
(4) Jaringan telepon *fixed line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.23, Blok I.C.27, dan Blok I.C.31.
(5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.15;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.15, dan Blok I.B.24;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.23, Blok I.C.24, dan Blok I.C.29; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.9.
(6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
   a. sistem jaringan irigasi; dan
   b. bangunan sumber daya air.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. jaringan irigasi primer;
b. jaringan irigasi sekunder; dan
c. jaringan irigasi tersier.

(3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melewati:
a. SWP I.A pada Blok I.A.12;
b. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, dan Blok I.B.26; dan
c. SWP I.C pada I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.33, dan Blok I.C.34.

(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang melewati SWP I.B pada Blok I.B.20 dan Blok I.B.21.

(5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang melewati:
a. SWP I.A pada Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
b. SWP I.B pada Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, dan Blok I.B.26;
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31, Blok I.C.32, Blok I.C.33, dan Blok I.C.34; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8 dan Blok I.D.9.

(6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. pintu air;
b. bendungan; dan
c. prasarana irigasi.

(7) Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat pada:
a. SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.7.

(8) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat pada:
a. SWP I.B pada Blok I.B.7, dan Blok I.B.20; dan
b. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.8 dan Blok I.D.11.

(9) Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdapat pada:
a. SWP I.B pada Blok I.B.20; dan
b. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.

(10) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas:
   a. unit air baku;
   b. unit produksi;
   c. unit distribusi; dan
   d. bak penampungan air hujan.

(2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. bangunan pengambil air baku terdapat pada SWP I.B pada Blok I.B.7; dan
   b. jaringan transmisi air baku, melewati SWP I.B pada Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9.

(3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. bangunan penampung air terdapat pada SWP I.B pada Blok I.B.7; dan
   b. jaringan transmisi air minum melewati:
      1. SWP I.A pada Blok I.A.22;
      2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.15, Blok I.B.19, Blok I.B.23, dan Blok I.B.24;
      3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.29, Blok I.C.31, Blok I.C.32, dan Blok I.C.34; dan
      4. SWP I.D pada Blok I.D.8 dan Blok I.D.10.

(4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi melewati:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25, dan Blok I.A.26;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, dan Blok I.B.26;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31, Blok I.C.32, Blok I.C.33, dan Blok I.C.34; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, dan Blok I.D.9.

(5) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.9, Blok I.A.13, dan Blok I.A.22;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.9; dan
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.11 dan Blok I.C.29.

(6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

Pasal 12

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas:
   a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
   b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.22;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.15;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.14, Blok I.C.16, dan Blok I.C.30; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1

(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinja yaitu IPLT Padang Tiji yang terdapat pada SWP I.B pada Blok I.B.9.

(4) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri atas:
   a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
   b. tempat penampungan sampah (TPS); dan
   c. tempat pemrosesan akhir (TPA).

(2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SWP I.B pada Blok I.B.23.

(3) Tempat penampungan sampah (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.19, dan Blok I.A.23;

b. SWP I.B pada Blok I.B.19 dan Blok I.B.20;
c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.8, Blok I.C.16, Blok I.C.20, Blok I.C.24, Blok I.C.27, dan Blok I.C.29; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.9.

(4) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SWP I.B pada Blok I.B.2.

(5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder;
c. jaringan drainase tersier;
d. bangunan peresapan (kolam retensi); dan
e. bangunan tampungan (polder).

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati:
a. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17;
b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.19, Blok I.B.20, dan Blok I.B.25;
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, dan Blok I.C.22; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.26;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, dan Blok I.B.26;
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.31, Blok I.C.32, dan Blok I.C.34; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.8, Blok I.D.9, dan Blok I.D.10.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25, dan Blok I.A.26;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, dan Blok I.B.26;
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31, Blok I.C.32, Blok I.C.33, dan Blok I.C.34; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, dan Blok I.D.9.

(5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di SWP I.D pada Blok I.D.2.
(6) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terletak di SWP I.A pada Blok I.A.1.
(7) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf j terdiri atas:
a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi;
c. jalur sepeda; dan
d. jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
a. ruas Batas Pidie/ Aceh Besar-Bts. Kota Sigli yang melewati:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.15, Blok I.B.19, Blok I.B.23, dan Blok I.B.24; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.
b. ruas Gampong Cot - Kret Paloh yang melewati:
1. SWP I.B pada Blok I.B.22 dan Blok I.B.26;
2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
3. SWP I.D pada Blok I.D.1.

c. ruas Gogo - Batee yang melewati SWP I.A pada Blok I.A.11, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.22.
d. ruas Padang Tiji - Kunyet yang melewati:
   1. SWP I.C pada Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.27, Blok I.C.29, Blok I.C.32, Blok I.C.34; dan
   2. SWP I.D pada Blok I.D.9.
e. ruas Padang Tiji - Reubee yang melewati:
   1. SWP I.B pada Blok I.B.24; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.23, Blok I.C.27, dan Blok I.C.31.
f. Jalur evakuasi bencana lainnya yang melewati:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.18, Blok I.A.21, dan Blok I.A.22;
   2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, dan Blok I.B.24;
   3. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.9, Blok I.C.12, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.23, Blok I.C.27, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31, dan Blok I.C.32; dan
   4. SWP I.D pada Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. tempat evakuasi sementara, meliputi:
   1. Mesjid Baitul Izah terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4;
   2. Kantor Gampong Cut Paloh terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
   3. Mesjid Gogo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6;
   4. Kantor Gampong Jurong Anoe Paloh terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.22; dan
   5. Kantor Gampong Buloh Peudaya terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.27.
b. tempat evakuasi akhir yaitu Mesjid Raudhaturahman terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4.

(4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.26.

(5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.26;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.15, Blok I.B.19, Blok I.B.22, Blok I.B.23, dan Blok I.B.24; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.20, Blok I.C.22, dan Blok I.C.23.

(6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d meliputi:
   a. zona lindung; dan
   b. zona budi daya.

(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan luas 217,64 (dua ratus tujuh belas koma enam empat) hektare terdiri atas:

a. Zona Badan Air;
b. Zona Perlindungan Setempat; dan
c. Zona Ruang Terbuka Hijau.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona badan air (BA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a dengan luas kurang lebih 76,84 (tujuh puluh enam koma delapan empat) hektare terdapat pada:

a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17;
b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.19, Blok I.B.20, dan Blok I.B.25;
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.30, Blok I.C.31, Blok I.C.33, dan Blok I.C.34; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, dan Blok I.D.11.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b dengan luas 89,68 (delapan puluh sembilan koma enam delapan) hektare terdapat pada:

a. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17;
b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.19, dan Blok I.B.20;
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.30, Blok I.C.31, Blok I.C.33, dan Blok I.C.34; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.7, Blok I.D.8, dan Blok I.D.9.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

(1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf c dengan luas 51,12 (lima puluh satu koma satu dua) hektare terdiri atas:
    a. Sub-zona taman kecamatan;
    b. Sub-zona taman kelurahan;
    c. Sub-zona taman RW;
    d. Sub-zona pemakaman; dan
    e. Sub-zona jalur hijau.
(2) Sub-zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 9,47 (sembilan koma empat tujuh) hektare terdapat pada:
    a. SWP I.B pada Blok I.B.15; dan
    b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.11, Blok I.C.29, dan Blok I.C.32.
(3) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 39,06 (tiga puluh sembilan koma nol enam) hektare terdapat pada:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.9, Blok I.A.13, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, dan Blok I.A.23;
    b. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.10, Blok I.B.14, Blok I.B.19, dan Blok I.B.20;
    c. SWP I.C pada Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.16, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.28, Blok I.C.30, Blok I.C.31, dan Blok I.C.32; dan
    d. SWP I.D pada Blok I.D.8, dan Blok I.D.9.
(4) Sub-zona taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare meliputi SWP I.D pada Blok I.D.8.

(5) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 2,35 (dua koma tiga lima) hektare terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.26; dan
   b. SWP I.C pada Blok I.C.18, Blok I.C.22, dan Blok I.C.24.

(6) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.8, dan Blok I.B.24.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b seluas 8.945,50 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima koma lima) hektare terdiri atas:
a. Zona Badan Jalan;
b. Zona Pertanian;
c. Zona Perikanan;
d. Zona Pertambangan;
e. Zona Kawasan Peruntukan Industri;
f. Zona Pariwisata;
g. Zona Perumahan;
h. Zona Sarana Pelayanan Umum;
i. Zona Perdagangan dan Jasa;
j. Zona Perkantoran;
k. Zona Peruntukan Lainnya;
l. Zona Pengelolaan Sampah;
m. Zona Transportasi; dan
n. Zona Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a dengan luas 168,65 (seratus enam puluh delapan koma enam lima) hektare terdapat pada:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25 dan Blok I.A.26;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25 dan Blok I.B.26;

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31, Blok I.C.32, Blok I.C.33 dan Blok I.C.34; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10 dan Blok I.D.11.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 23

(1) Zona pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b dengan luas 5.585,08 (lima ribu lima ratus delapan puluh lima koma nol delapan) hektare terdiri atas:
   a. Sub-zona tanaman pangan;
   b. Sub-zona hortikultura;
   c. Sub-zona perkebunan; dan
   d. Sub-zona peternakan.
(2) Sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2.350,33 (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma tiga tiga) hektare terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A,4, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25, dan Blok I.A.26;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, dan Blok I.B.26;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31, Blok I.C.32, Blok I.C.33, dan Blok I.C.34; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, dan Blok I.D.10.
(3) Sub-zona hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 246,37 (dua ratus empat puluh enam koma tiga tujuh) hektare meliputi:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
(4) Sub-zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2.979,49 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma empat sembilan) hektare terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.17 dan Blok I.A.26;

b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.12, Blok I.B.16, Blok I.B.20 dan Blok I.B.25;
c. SWP I.C pada Blok I.C.21, Blok I.C.23, Blok I.C.27, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.33, dan Blok I.C.34; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10 dan Blok I.D.11.

(5) Sub-zona peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 8,90 (delapan koma sembilan) hektare terdapat pada SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 24

Zona perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c dengan luas 5,17 (lima koma satu tujuh) hektare berupa sub-zona perikanan budidaya yang terletak di SWP I.B pada Blok I.B.9.

Paragraf 4
Zona Pertambangan

Pasal 25

(1) Zona pertambangan (T) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf d dengan luas 2,47 (dua koma empat tujuh) hektare untuk sub-zona peruntukan pertambangan batuan.
(2) Sub-zona peruntukkan pertambangan batuan (MBT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat pada:
a. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
b. SWP I.D pada Blok I.D.3.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf e dengan luas 19,44 (sembilan belas koma empat empat) hektare terdapat pada:
a. SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.8 dan Blok I.C.9.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 27

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf f dengan luas 39,74 (tiga puluh sembilan koma tujuh empat) hektare terletak di SWP I.B pada Blok I.B.11 dan Blok I.B.15.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 28

(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf g dengan luas 2.913,15 (dua ribu sembilan ratus tiga belas koma satu lima) hektare terdiri atas:
   a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi;
   b. sub-zona perumahan kepadatan sedang; dan
   c. sub-zona perumahan kepadatan rendah.

(2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 215,51 (dua ratus lima belas koma lima satu) hektare terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.20, dan Blok I.A.21;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, dan Blok I.B.26;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.18; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.2.

(3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.041,54 (seribu empat puluh satu koma lima empat) hektare terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, dan Blok I.B.26;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31, Blok I.C.32, Blok I.C.33, dan Blok I.C.34; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.7.

(4) Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.656,10 (seribu enam ratus lima puluh enam koma satu nol) hektare terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.24, Blok I.A.25, dan Blok I.A.26;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.21, Blok I.B.22, dan Blok I.B.23;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.9, Blok I.C.29, Blok I.C.32 dan Blok I.C.34; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, dan Blok I.D.9.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf h dengan luas 47,23 (empat puluh tujuh koma dua tiga) hektare terdiri atas:
   a. sub-zona SPU skala kota;
   b. sub-zona SPU skala kecamatan; dan
   c. sub-zona SPU skala kelurahan.
(2) Sub-zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6,35 (enam koma tiga lima) hektare terdapat pada:
   a. SWP I.B pada Blok I.A.12
   b. SWP I.B pada Blok I.B.24; dan
   c. SWP I.C pada Blok I.C.29.
(3) Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,65 (sepuluh koma enam lima) hektare terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.13 dan Blok I.A.20;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.11; dan
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.14, dan Blok I.C.29.
(4) Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 30,24 (tiga puluh koma dua empat) hektare terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.13, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.20, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.19, Blok I.B.22, dan Blok I.B.24;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.32; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.8, dan Blok I.D.9.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

(1) Zona sarana perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf i dengan luas 102,18 (seratus dua koma satu delapan) hektare terdiri atas:
   a. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP; dan
   b. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP.
(2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 11,54 (sebelas koma lima empat) hektare terdapat pada:

a. SWP I.B pada Blok I.B.23 dan Blok I.B.24, dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

(3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 90,64 (sembilan puluh koma enam empat) hektare terdapat pada:
a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.26;
b. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.15, Blok I.B.19, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, dan Blok I.B.26; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 31

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf j dengan luas 11,15 (sebelas koma satu lima) hektare terletak di SWP I.B pada Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.24.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 32

(1) Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf k dengan luas 6,01 (enam koma nol satu) hektare terdiri atas:
a. sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM);
b. sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
c. sub-zona Pergudangan.

(2) Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,91 (satu koma sembilan satu) hektare terletak di SWP I.B pada Blok I.B.7.

(3) Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,19 (satu koma satu sembilan) hektare terletak di SWP I.B pada Blok I.B.9.

(4) Sub-zona pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,90 (dua koma sembilan) hektare terdapat pada:
a. SWP I.A pada Blok I.A.12 dan Blok I.A.26; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.5.

Paragraf 12
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 33

Zona pengelolaan persampahan (PP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf l berupa sub zona Pengelolaan Persampahan (PP) dengan luas 12,17 (dua belas koma satu tujuh) hektare terletak di SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 13
Zona Transportasi

Pasal 34

Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf m berupa sub zona Transportasi (TR)dengan luas 1,49 (satu koma empat sembilan) hektare terletak di SWP I.C pada Blok I.C.6.

Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf n berupa sub-zona pertahanan dan keamanan dengan luas 31,55 (tiga puluh satu koma lima lima) hektare terdapat pada:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1 berupa Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) 17/Komposit; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.2 berupa Koramil 02/Padang Tiji.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Padang Tiji.
(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
    b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
KKPR

Pasal 37

(1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

(1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas

a. program pengembangan kawasan;
b. lokasi;
c. sumber dana;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(2) Program pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. Perwujudan rencana Pola Ruang.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat dimana program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.

(4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
d. badan usaha milik negara;
e. swasta;
f. masyarakat; dan
g. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. kementerian/ lembaga;
b. perangkat daerah;
c. swasta;
d. masyarakat; dan/ atau
e. pemangku kepentingan lainnya.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan meliputi:
a. tahap pertama pada periode 2024;
b. tahap kedua pada periode tahun 2025 – 2029;
c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 – 2034;
d. tahap keempat pada periode tahun 2035 – 2039; dan
e. tahap kelima pada periode tahun 2040 – 2044.

(7) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f berfungsi sebagai:
a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara (*air right development*) dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan Lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penataan ruang yang berlaku.

(3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. aturan dasar/materi wajib; dan
b. teknik pengaturan zonasi.

(4) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. pemanfaatan ruang yang diizinkan (I);
b. pemanfaatan ruang yang terbatas (T), terdiri atas:
1. T1 : pembatasan waktu operasional dari jam 09.00 WIB s/d 18.00 WIB;
2. T2 : terbatas luas 10% dari luas Zona/ Sub-Zona dalam satu blok, jika sudah melebihi 10% maka tidak diizinkan atau dapat diizinkan dengan pertimbangan khusus;
3. T3 : terbatas luas 30% dari luas zona/ sub-zona dalam satu blok, jika sudah melebihi 30% maka tidak diizinkan atau dapat diizinkan dengan pertimbangan khusus;
4. T4 : diizinkan secara terbatas dengan pembatasan jumlah jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus;
5. T5 : diizinkan terbatas kegiatan hanya untuk industri mikro dan Industri Kecil; dan
6. T6 : pembatasan hanya pada blok-blok yang sudah memiliki izin usaha pertambangan.
c. pemanfaatan ruang yang bersyarat (B), terdiri atas:
1. B1 : Wajib Amdal atau UKL, UPL, Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);

2. B2 : Wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir;
3. B3 : diizinkan dengan syarat mengikuti qanun syariah Aceh;
4. B4 : diizinkan dengan syarat kegiatan pertambangan tertutup; dan
5. B5 : diizinkan dengan syarat jarak minimal dari 2.000 meter dari pagar terluar kendang terhadap Kawasan permukiman atau aktivitas perkotaan.

d. pemanfaatan ruang yang dilarang (X).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:

a. zona badan air (BA)
b. zona perlindungan setempat (PS).
c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH:
   1. sub-zona taman kecamatan dengan Kode RTH-3;
   2. sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
   3. sub-zona taman rw dengan kode RTH-5;
   4. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7;
   5. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
d. zona badan jalan (BJ).
e. zona pertanian (P):
   1. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
   2. sub-zona hortikultura dengan kode P-2;
   3. sub-zona perkebunan dengan kode P-3;
   4. sub-zona peternakan dengan kode P-4.
f. Zona perikanan yang yaitu sub-zona perikanan budi daya (IK-2);
g. zona perumahan (R):
   1. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
   2. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
   3. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
h. zona perdagangan dan jasa (K):
   1. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
   2. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP I.Dengan kode K-3.
i. zona perkantoran (KT).
j. zona kawasan peruntukan industri (KPI).
k. zona sarana pelayanan umum (SPU):
   1. sub-zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
   2. sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
   3. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3.
l. zona transportasi (TR).
m. zona pertahanan dan keamanan (HK):
n. zona pariwisata (W).
o. zona peruntukan lainnya (PL):
   1. sub-zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3;
   2. sub-zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4;
   3. sub-zona pergudangan dengan kode PL-5.
p. zona pengelolaan persampahan (PP).

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) huruf b terdiri atas :
   a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
   b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
   c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
   d. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
   e. kavling minimal.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 42

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) huruf c meliputi :
   a. garis sempadan bangunan (GSB) minimal;
   b. tinggi bangunan maksimum;
   c. jarak bebas antarbangunan minimal; dan
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada kegiatan yang mengajukan permohonan perizinan baru.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal

Pasal 43

(1) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) huruf d meliputi :
   a. jalur pejalan kaki;
   b. ruang terbuka hijau;
   c. ruang terbuka non hijau;
   d. prasarana lingkungan; dan
   e. fasilitas pendukung.

(2) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada kegiatan yang mengajukan permohonan perizinan baru.
(3) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tabel ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 44

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) huruf e meliputi:
a. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
d. ketentuan khusus sempadan; dan
e. ketentuan khusus migrasi satwa.

Paragraf 1
Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 45

(1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf a seluas 2.180,33 (dua ribu seratus delapan puluh koma tiga tiga) hektare terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25, dan Blok I.A.26;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, dan Blok I.B.26;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31, Blok I.C.32, Blok I.C.33, dan Blok I.C.34; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, dan Blok I.D.10.
(2) Ketentuan khusus lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. pengaturan kegiatan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan mengacu pada matriks ITBX dengan tidak melakukan alih fungsi lahan;
   b. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dikecualikan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bencana alam;

c. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dilaksanakan untuk keperluan pembangunan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, perluasan bandar udara, stasiun kereta api, fasilitas keselamatan umum dan/atau jaringan listrik;
e. alih fungsi lahan untuk kepentingan umum harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. memiliki kajian kelayakan strategis;
   2. Memiliki perencanaan alih fungsi lahan
   3. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
   4. Ketersediaan lahan pengganti
f. alih fungsi lahan untuk kepentingan umum diwajibkan menyediakan lahan pengganti dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
   2. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut; dan
   3. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
g. penyediaan lahan pengganti untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.
h. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat bencana alam dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dapat ditunda di daerah bencana alam, penetapan kejadian bencana alam ditetapkan oleh Bupati melewati Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie.
i. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat bencana alam dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dapat ditunda di daerah bencana alam, dengan syarat:
   1. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
   2. ketersediaan lahan pengganti.

(3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 46

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf b seluas 9.163,13 (sembilan ribu seratus enam puluh tiga koma satu tiga) hektare terdapat pada:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25, Blok I.A.26;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26;
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31, Blok I.C.32, Blok I.C.33, Blok I.C.34; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.11, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
b. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dan banjir tingkat tinggi;
c. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang;
d. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana likuefaksi tingkat sedang, dan rawan bencana banjir tinggi;
e. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dan likuefaksi tingkat tinggi; dan
f. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, likuefaksi tingkat tinggi, dan banjir tingkat tinggi.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
a. Pembangunan baru bangunan gedung wajib mengadopsi struktur bangunan tahan gempa;
b. Pengembangan Kawasan Perumahan Komersil wajib menyediakan lapangan terbuka sebagai titik kumpul;
c. Penyediaan rambu jalur evakuasi bencana.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
a. Pembangunan baru bangunan gedung wajib mengadopsi struktur bangunan tahan gempa;
b. Penyediaan sumur biopori pada tiap lingkungan perumahan; dan
c. Penyediaan sistem pemantauan dan peringatan banjir.

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

a. Pembangunan baru bangunan gedung wajib mengadopsi struktur bangunan tahan gempa;
b. Pengembangan Kawasan Perumahan Komersil wajib menyediakan lapangan terbuka sebagai titik kumpul;
c. Penyediaan rambu jalur evakuasi bencana; dan
d. Tidak diperbolehkan melakukan pengambilan air tanah.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana likuefaksi tingkat sedang, dan rawan bencana banjir tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut;
a. Pembangunan baru bangunan gedung wajib mengadopsi struktur bangunan tahan gempa;
b. Pengembangan Kawasan Perumahan Komersil wajib menyediakan lapangan terbuka sebagai titik kumpul;
c. Penyediaan rambu jalur evakuasi bencana;
d. Tidak diperbolehkan melakukan pengambilan air tanah; dan
e. Penyediaan sistem pemantauan dan peringatan banjir.

(7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dan likuifaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
a. Pembangunan baru bangunan Gedung wajib mengadopsi struktur bangunan tahan gempa;
b. Pengembangan Kawasan Perumahan Komersil wajib menyediakan lapangan terbuka sebagai titik kumpul;
c. Penyediaan rambu jalur evakuasi bencana; dan
d. Tidak diperbolehkan melakukan pengambilan air tanah.

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, likuifaksi tingkat tinggi dan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut:
a. Pembangunan baru bangunan Gedung wajib mengadopsi struktur bangunan tahan gempa;
b. Pengembangan Kawasan Perumahan Komersil wajib menyediakan lapangan terbuka sebagai titik kumpul;
c. Penyediaan rambu jalur evakuasi bencana;
d. Tidak diperbolehkan melakukan pengambilan air tanah; dan
e. Penyediaan sistem pemantauan dan peringatan banjir.

(9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 47

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf c meliputi:
a. tempat evakuasi sementara; dan
b. tempat evakuasi akhir.

(2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2,14 (dua koma satu empat) hektare terdapat pada:
   a. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
   b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.6, Blok I.C.22, Blok I.C.27.

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
   a. memiliki kemudahan akses kendaraan;
   b. dekat dengan jalur evakuasi minimal jalan lingkungan;
   c. penyediaan rambu evakuasi bencana ;
   d. memiliki lapangan terbuka;dan
   e. tersedia sumber air bersih dan WC Umum.

(4) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektare terdapat pada SWP I.C pada Blok I.C.4.

(5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
   a. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 meter persegi per orang; dan
   b. tersedia sumber air bersih dan WC Umum.

(6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 48

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf d meliputi:
   a. sempadan sungai; dan
   b. sempadan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3,22 (tiga koma dua dua) hektare terdapat pada:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.15;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.33, Blok I.C.34; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.2.

(3) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
   a. pembatasan bangunan baru khususnya kegiatan perdagangan dan jasa pada zona perumahan;
   b. KDB Maksimal 60%;

c. pembatasan pengembangan bangunan eksisting; dan
d. penambahan bangunan permanen yang diizinkan meliputi bangunan prasarana sumberdaya air, RTH, tiang listrik, tiang telepon, pembangkit listrik dan sejenisnya untuk utilitas umum.

(4) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 59,89 (lima puluh sembilan koma delapan sembilan) hektare terdapat pada:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25, dan Blok I.A.26;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.15, dan Blok I.B.19; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.7, Blok I.C.9 dan Blok I.C.15.

(5) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
a. pada sempadan jaringan SUTT 150 kV pada lapangan terbuka memiliki ketinggian bangunan maksimal 8,5 meter;
b. pada sempadan jaringan SUTT 150 kV pada perkebunan dan kawasan terbangun atau bangunan memiliki ketinggian bangunan maksimal 5 meter;
c. pada sempadan jaringan SUTT 150 kV pada jaringan jalan memiliki ketinggian bangunan maksimal 9 meter;
d. pada sempadan jaringan SUTET 275 kV pada lapangan terbuka memiliki ketinggian bangunan maksimal 12,5 meter;
e. pada sempadan jaringan SUTET 275 kV ppada perkebunan dan kawasan terbangun atau bangunan maksimal 9 meter; dan
f. pada sempadan jaringan SUTET 275 kV pada jaringan jalan memiliki ketinggian bangunan maksimal 15 meter.

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus Migrasi Satwa

Pasal 49

(1) Ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf e seluas 28,42 (dua puluh delapan koma empat dua) hektare terdapat pada SWP I.D pada Blok I.D.11.

(2) Ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
a. pendirian dan/atau penempatan bangunan tidak mengganggu atau menutup jalur migrasi satwa yang dilindungi di dalam kawasan konservasi;
b. aktivitas perkebunan tidak dilakukan pada musim puncak migrasi satwa;

c. tidak memasang sarana penunjang perkebunan yang menghambat jalur migrasi satwa;dan
d. penyediaan tanda atau rambu informasi terkait jalur migrasi satwa.

(3) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada pada Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 50

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf f terdiri atas ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
(2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
(7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pemberian kompensasi;
b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
d. penghargaan.
(8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. pemberian kompensasi;
c. subsidi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. penyediaan prasarana dan sarana;

h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.

(9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
b. pengenaan kompensasi; dan/atau
c. penalti.

(10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 51

(1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b berupa Zona Pengendalian Pertumbuhan dengan kode k.

(2) Teknik Pengaturan Zonasi Zona Pengendalian Pertumbuhan dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 220,42 (dua ratus dua puluh koma empat dua) hektare berlaku pada sub-zona perumahan kepadatan sedang yang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.27, Blok I.C.28 dan Blok I.C.31.

(3) Teknik Pengaturan Zonasi Zona Pengendalian Pertumbuhan dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. pembangunan baru kawasan perumahan komersil dilarang;
b. pengembangan kegiatan hunian eksisting diarahkan penambahan lantai bangunan; dan
c. penyediaan taman lingkungan pada setiap lingkungan perumahan.

(4) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Kelembagaan dan peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang berupa pembentukan forum penataan ruang.

(2) Pembentukan forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah.
(3) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
(4) Keanggotaan forum penataan ruang terdiri atas:
    a. instansi vertikal bidang pertanahan;
    b. perangkat daerah;
    c. asosiasi profesi;
    d. asosiasi akademisi; dan
    e. tokoh masyarakat.
(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja forum penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
(6) Pembentukan forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Padang Tiji berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Padang Tiji dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
    a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
    b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
    c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati Pidie tentang RDTR Kawasan Perkotaan Padang Tiji Tahun 2024-2044 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melewati kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penataan ruang.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:
    a. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
    b. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
        1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
        2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
        3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
    c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang dan/atau konfirmasi KKPR serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
    d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan percepatan untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 21 Maret 2024 M
10 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE,

WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 21 Maret 2024 M
10 Ramadhan 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 11